

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
BELANJA PEGAWAI**

**(Studi Empiris Terhadap Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2015)**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

FITRI NUR AINI

B 200130272

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
BELANJA PEGAWAI**

**(Studi Empiris Terhadap Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2015)**

PUBLIKASI ILMIAH

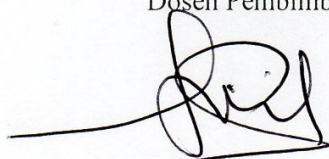
Yang ditulis oleh

FITRI NUR AINI

B200130272

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Andy Dwi Bayu Bawono, SE., M.Si., Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN

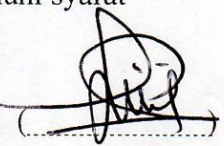
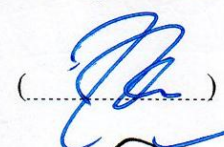

**“ PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
BELANJA PEGAWAI
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2015)”**

Yang ditulis oleh :

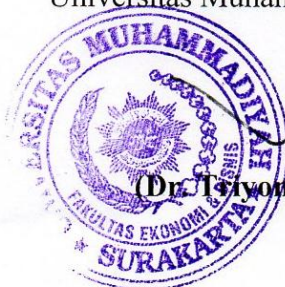
FITRI NUR AINI

B20010272

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Sabtu, 21 Januari 2017
Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji :

1. Andy Dwi Bayu Bawono, SE., M.Si., Ph.D ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Zulfikar, S.E., M.Si ()
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Drs. Atwal Arifin, M.Si., Akt., CA ()
(Anggota 2 Dewan Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Irfyono, SE, M.Si)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat pernah ditulis oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Januari 2017

Penulis



Fitri Nur Aini

B200130272

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
BELANJA PEGAWAI
(Studi Empiris Terhadap Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2015)**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Pegawai. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah yang terdapat dalam laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tahun anggaran 2013-2015. Teknik pengambilan Sampel dilakukan adalah sampel jenuh yang merupakan tehnik dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Dengan 105 data dianalisis dengan metode regresi linear berganda program SPSS 16. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Pegawai, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai.

Kata kunci : PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Pegawai.

Abstract

The aim the research to examine the effect Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Local Revenue for Servent Expenditure. The research used secondary data from Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah based on Budget Realization Report, fiscal year from 2013-2015. Method of sample is saturated sample is all population is sample. The 105 data analized by linear regression analysis with SPSS 16 program. The result show local Revenue, General Allocatiom Fund and Spesial Allocation Fund have significant effect to servent expenditure, and Revenue Sharing Fund no significant effect to Servent Expenditure.

Key word : Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Sharing Revenue Fund and Servent Expenditure

1. PENDAHULUAN

Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah semakin memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagai konsekuensi pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan yang sudah menjadi kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pelimpahan kekuasaan diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat tercapai secara optimal dan menyeluruh. Selain dalam hal tersebut, dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan pula agar terciptanya daya saing tiap daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, serta potensi dari keanekaragaman daerah masing-masing. UU tersebut diatas memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya secara otonom dengan tidak hanya mengandalkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 23/2014, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari : a). Pendapatan Asli Daerah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah b) pendapatan transfer pemerintah pusat: dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa c) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Darise (2006) menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara yang terdiri atas Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antar daerah otonom dan pemerataan kualitas pelayanan publik yang maksimal.

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi dimana dalam pengalokasiannya tidak dapat dipisahkan, melihat bahwa tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling melengkapi (Halim, 2001). Tujuan dengan adanya dana perimbangan salah satunya agar terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan haknya. Dengan terpenuhinya dan tercapainya segala kebutuhan masyarakat tentu akan menjadi tolok ukur bahwa

penyelenggaraan otonomi daerah terlaksana secara optimal. Dan kebutuhan dan segala bentuk pengeluaran pun dapat dikategorikan berdasarkan beberapa hal, salah satunya berdasarkan kelompoknya. Darise (2002) menyatakan berdasarkan klasifikasi kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan), bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai (honorarium dan upah), belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Daerah Jawa Tengah merupakan daerah provinsi yang memiliki 29 kabupaten dan 6 kota, yang memiliki kekayaan alam melimpah menjadi pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya dana perimbangan (DAU, DAK DAN DBH) akan menjadi dana penopang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan banyaknya pemerintahan daerah kabupaten/kota, tentu provinsi Jawa Tengah memiliki pegawai dengan kuantitas 15.926 (Data BPS 2013) demi tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal. Meningkatnya alokasi belanja pegawai pun dipengaruhi semakin meningkatnya kuantitas pegawai, dimana pemerintah beranggapan dengan semakin meningkatnya kuantitas pegawai akan semakin pula meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Namun dalam kenyataan masih banyak terdapat pelayanan umum terhadap masyarakat yang terlihat kurang maksimal, seperti terjadinya antrean yang panjang dalam pembuatan E-KTP, tentu hal ini menjadi salah satu permasalahan dengan banyaknya kuantitas pegawai yang menggunakan alokasi anggaran terbesar tidak seimbang dengan kualitas yang kurang maksimal terhadap masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti termotivasi untuk meneliti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Pegawai (Studi empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015)”.

2. METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Tehnik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 kota. Teknik sampling yang digunakan adalah *non probability* sampling, dengan tehnik sampling jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel, $35 \times 3 = 105$ sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder dari penelitian ini diperoleh langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah. Data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2015.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Belanja Pegawai

Permendagri No. 58/2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Bastian (2006) menyebutkan bahwa jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam penelitian ini dalam Pendapatan Asli Daerah dapat kita dapatkan dari Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013-2015 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah} \\ + \text{lain-lain PAD yang sah}$$

Dana Alokasi Umum

Sidik *et al* (2002) mengatakan bahwa penetapan Dana Alokasi Umum dilakukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal yang dimana kebutuhan DAU suatu daerah yang ditentukan atas kebutuhan fiskal dan potensi fiskal suatu daerah (*fiscal gap*). Dalam penetapannya DAU memiliki azaz-azaz pokok yaitu dapat diterima oleh daerah, bersifat transparan dan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dalam penelitian ini diketahui dari Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013-2015.

Dana Alokasi Khusus

Dalam UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan Daerah dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Kebutuhan tertentu yang dimaksud adalah kebutuhan yang sulit dialokasikan secara umum hanya untuk daerah yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam penelitian ini diketahui dari Laporan Realisasi APBD tahun 2013-2015.

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan cermin dari kapasitas suatu daerah disamping pendapatan asli daerah, apabila dalam pengelolaan hasil kekayaan daerah dan pajak daerah tentu akan mencerminkan kapasitas fiskal tinggi bagi daerah begitu pula akan mendapatkan bagi hasil yang tinggi dan sebaliknya. Dalam penelitian ini dana bagi hasil diketahui dari Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013-2015. Dalam menghitung jumlah Dana Bagi Hasil dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$DBH = DBH (\text{pajak}) + DBH (\text{sda})$$

Teknik Analisis Data

Uji Hipotesis

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis Analisis regresi linier berganda adalah pengujian yang dilakukan oleh peneliti yang bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan naik/turun variabel dependen , bila ada dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor, (Sugiyono, 2010). Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai di Provinsi Jawa Tengah yang akan diuji dengan tingkat signifikansi. Persamaan yang dihasilkan dari hubungan antar variabel tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan

Y: belanja pegawai

X1: PAD

X2: DAU

X3: DAK

X4: DBH

β_0 : Konstanta

β_1 - β_5 : Koefisien variabel independen

e: kesalahan residual

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* sebesar 1,114 dan nilai sig. sebesar 16,7% dengan demikian dinyatakan berdistribusi normal, karena nilai signifikansi lebih dari besar dari 0.05, (Mudrajad, 2001).

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Diketahui bahwa uji *glejser* yang dilakukan dari keempat variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. [http://www.spssindonesia.com/2014/02/ujiheteroskedastisitas-
glejser-spss.html](http://www.spssindonesia.com/2014/02/ujiheteroskedastisitas-glejser-spss.html).

Hasil Uji Multikolinearitas

Dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* lebih kecil dari 10, oleh karena itu dapat dikatakan data tersebut tidak terjadi multikolinearitas, (Mudrajad, 2001)

Hasil Uji Autokorelasi

Dengan menggunakan derajat kesalahan 5%, jika prediktor sebanyak dua, maka batas atas (U) adalah sebesar 1,6038 sedangkan batas bawah (L) adalah sebesar 1,7617. Oleh karena itu nilai *DW* regresi sebesar 1,926 yang berarti lebih besar dari nilai batas atas, sehingga autokorelasi lebih besar dari 0. Dengan demikian disimpulkan bahwa hasil regresi terbebas dari autokorelasi, (Mudrajad, 2001).

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh PAD terhadap Belanja Pegawai. variabel PAD

Dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,01 < 0,065$. Oleh karena itu H1 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Pegawai. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkatkan Belanja Pegawai karena dengan memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan memungkinkan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiridengan tidak terlalu tergantung terhadap pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah akan lebih berinovasi untuk menggali potensi yang dimiliki daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan termasuk belanja pegawai yang merupakan kebutuhan rutin pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

Variabel DAU dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu H2 diterima artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang dikucurkan pemerintah pusat menandakan bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhannya, semakin tingginya Dana Alokasi Umum yang diterima daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja termasuk belanja pegawai semakin tinggi pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Pegawai

Variabel DAK dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,022 < 0,05$. Oleh karena itu H3 diterima artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap

Belanja Pegawai. Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat terhadap daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus demi meningkatkan kualitas pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, sehingga pengalokasian Dana Alokasi Khusus pun berdasarkan kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh daerah dimana setiap daerah memiliki kebutuhan dengan skala prioritas yang berbeda-beda. Daerah yang masih memerlukan peningkatan kualitas pelayanan akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang lebih tinggi dibanding dengan daerah yang sudah memiliki pelayanan umum yang memadai. Semakin tingginya Dana Alokasi Khusus maka ketergantungan daerah terhadap pusat tinggi hal ini termasuk dalam memenuhi kebutuhan daerah termasuk dalam pemenuhan belanja pegawai.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Pegawai

Variabel DBH dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,460 > 0,05$. Oleh karena itu H4 ditolak artinya Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pegawai. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang dibagikan dari pemerintah pusat terhadap daerah sesuai dengan persentase dari hasil kekayaan alam yang dikelola dan pajak yang diterima oleh daerah, semakin tinggi hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pajak yang diterima daerah akan lebih tinggi pula dana bagi hasil yang diterima daerah, hal ini menandakan bahwa daerah dengan dana bagi hasil tinggi dapat dikatakan dapat memenuhi kebutuhan sendiri, namun banyak daerah yang hanya memiliki dana bagi hasil yang tidak sama antar daerah sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Bagi Hasil belum mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah termasuk belanja pegawai.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil pengujian hipotesis secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Pegawai, sedangkan pengujian hipotesis keempat secara parsial menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Pegawai.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan tiga tahun anggaran sebagai data penelitian yang tingkat generalisasinya kurang baik, selain itu masih banyak variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi variabel belanja pegawai sebagai variabel dependen. Daerah yang dijadikan obyek penelitian hanyalah provinsi Jawa Tengah yang hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan terhadap pemerintah daerah di Indonesia

Saran

Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan pengelolaan hasil kekayaan daerah agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil kekayaan alam maupun dalam pengelolaan pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri termasuk belanja pegawai untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah juga mengoptimalkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dikururkan oleh pemerintah pusat secara optimal agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanjanya termasuk belanja pegawai. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan data dengan tahun yang lebih dari tiga Tahun Anggaran agar dapat diketahui kecenderungan hasil penelitian dalam kurun waktu yang lebih lama. Dan dapat pula ditambahkan variabel independen seperti jumlah penduduk, ukuran wilayah pendapatan lain-lain yang dapat menjadi faktor penentu belanja pegawai. Obyek penelitian diperluas tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah saja agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan terhadap pemerintah daerah diseluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Suparmoko.2002.Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah.Andi.Yogyakarta.
- Halim, Abdul.2001.Manajemen Keuangan Daerah.UPP AMP YKPN.Yogyakarta.
- Bastian, Indra.2006.Sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Indonesia.Salemba empat.Jakarta.

- Sidik, Dkk. 2002. Dana Alokasi Umum konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah. Kompas. Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks kelompok Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- Ghozali, Imam. 2000. Aplikasi Analisa Multivariate dengan program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Riduwan. 2013. Dasar-Dasar Statistika. Alfabeta. Bandung.
- Mudrajad, Kuncoro. 2001. Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi. AMP-AYKPN. Yogyakarta.
- Putra, Ida Bagus Dwi dan A.A.N.B Dwirandra. 2015. *"Dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah Provinsi Bali"*. ISSN: 2303-1018E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.3 Desember (2015): 811-827.
- Prastiwi, Ayu Siti Nurlaela dan Yuli Chomsatu. 2016. *"Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja pegawai terhadap belanja modal pemerintah kota Surakarta"*. ISSN: 2337-4349 Seminar Nasional IENACO -2016. Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Islam Batik: Surakarta.
- Hidayah, Nurul dan Hari Setiyawati. 2014. *"pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah"*. Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 01, Januari 2014: 45-58.
- Akbar, Muhammad Ridho, Henny Indriyani dan Septiani Fransisca. 2016. *"pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap pengalokasian Belanja Pegawai"*. ISBN: 978-602-74335-0-2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Dharma: Sumatera Selatan.
- Indraningurm, Tri. 2011. *"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah"*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro: Semarang.

Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. "*Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pengalokasian Belanja Modal*". ISSN 22.52-6765. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang: Semarang.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. "*Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian Belanja Modal*". ISSN 22.52-6765. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang: Semarang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan Daerah.

Tanpa nama. 2014. [http://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-heteroskedastisitas-
glejser-spss.html](http://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-heteroskedastisitas-glejser-spss.html). Diakses pada tanggal 2 Oktober 2016. Pukul 14.54 WIB.

Lind, Marchal and Wathen. Statistical Techniques in Bussiness and Economic: Chapter 12, McGraw-Hill, new York. US. 2005.

Bps3300@BPS.go.id

Buletin Teknis nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah 29 Desember 2006.